

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Tenggarong Seberang

Kecamatan Tenggarong Seberang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Tenggarong Seberang terdiri dari 18 desa dan kelurahan. Secara administratif, Kecamatan Tenggarong Seberang berbatasan secara langsung dengan Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Sebulu pada bagian barat, Kecamatan Loa Kulu pada bagian selatan, Kecamatan Marang Kayu pada bagian utara serta berbatasan dengan Kota Samarinda dan Kecamatan Muara Badak pada bagian timur. Adapun peta administrasi Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat pada gambar 4.1.

Berdasarkan RTRW Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Tenggarong Seberang memiliki beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang diantaranya adalah hutan produksi, badan air, kawasan wisata, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan, kawasan tambang, kawasan transmigrasi, kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering serta sempadan sungai. Data luasan dari penggunaan lahan pada Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4. 1 Luasan Penggunaan Lahan Kecamatan Tenggarong Seberang

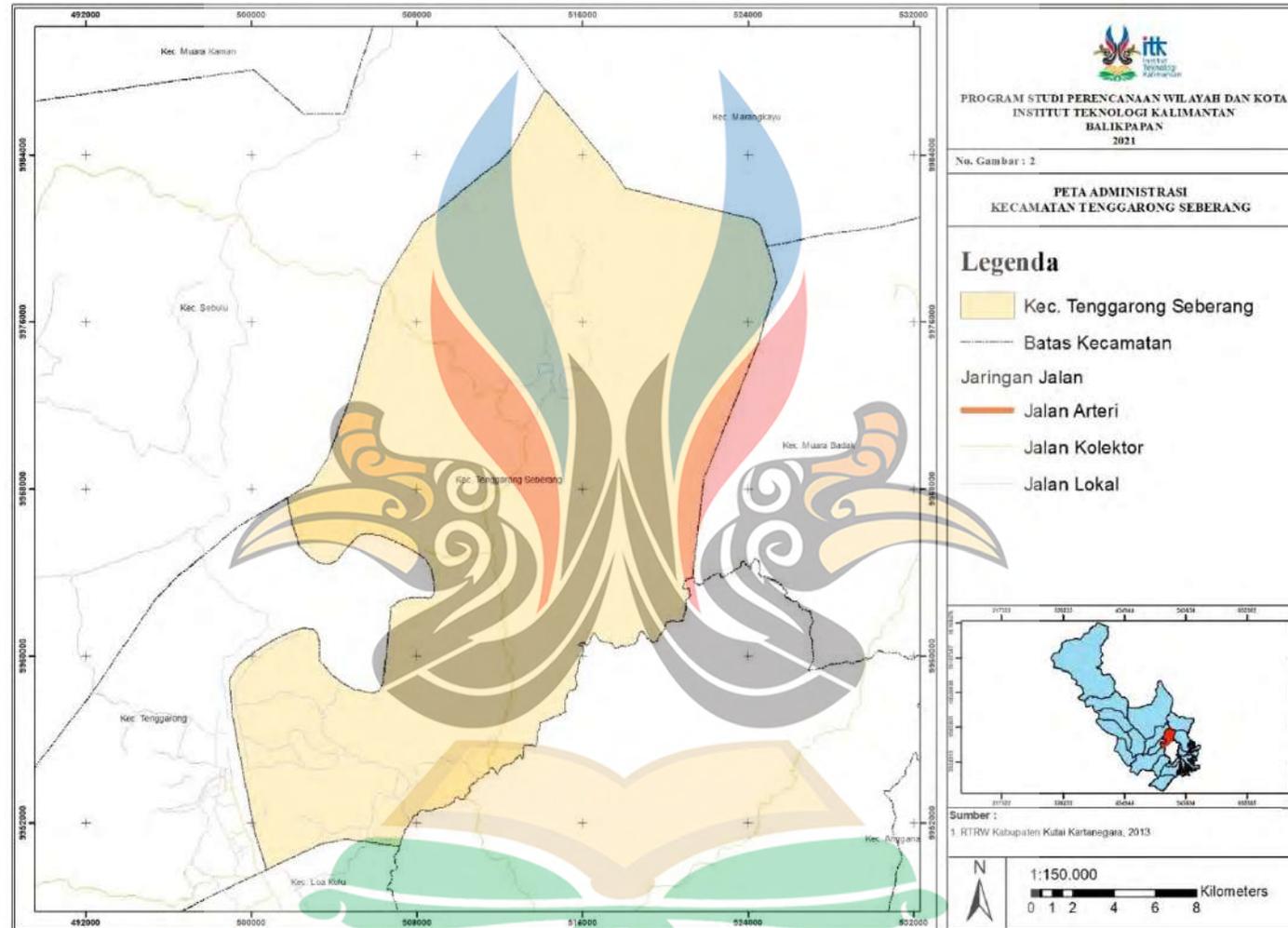
No.	Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)
1.	Hutan Produksi	9.601,422
2.	Badan Air	965,1946
3.	Kawasan Wisata	5,676798
4.	Kawasan Industri	33,00238
5.	Kawasan Perkebunan	4.053,223
6.	Kawasan Perumahan Pedesaan	3.733,568
7.	Kawasan Perumahan Perkotaan	420,308
8.	Kawasan Tambang	6.968,357
9.	Kawasan Transmigrasi	18.144,28
10.	Pertanian Lahan Basah	1.066,872
11.	Pertanian Lahan Kering	5.705,916
12.	Sempadan Sungai	411,6232

*)RTRW Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2013-2033, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas penggunaan lahan di Kecamatan Tenggarong Seberang adalah kawasan transmigrasi dengan luasan 18.144,28 Ha. Sedangkan kawasan dengan luasan penggunaan lahan terendah merupakan kawasan wisata dengan luas sebesar 5,67 Ha. Peta pola ruang Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat pada gambar 4.2.

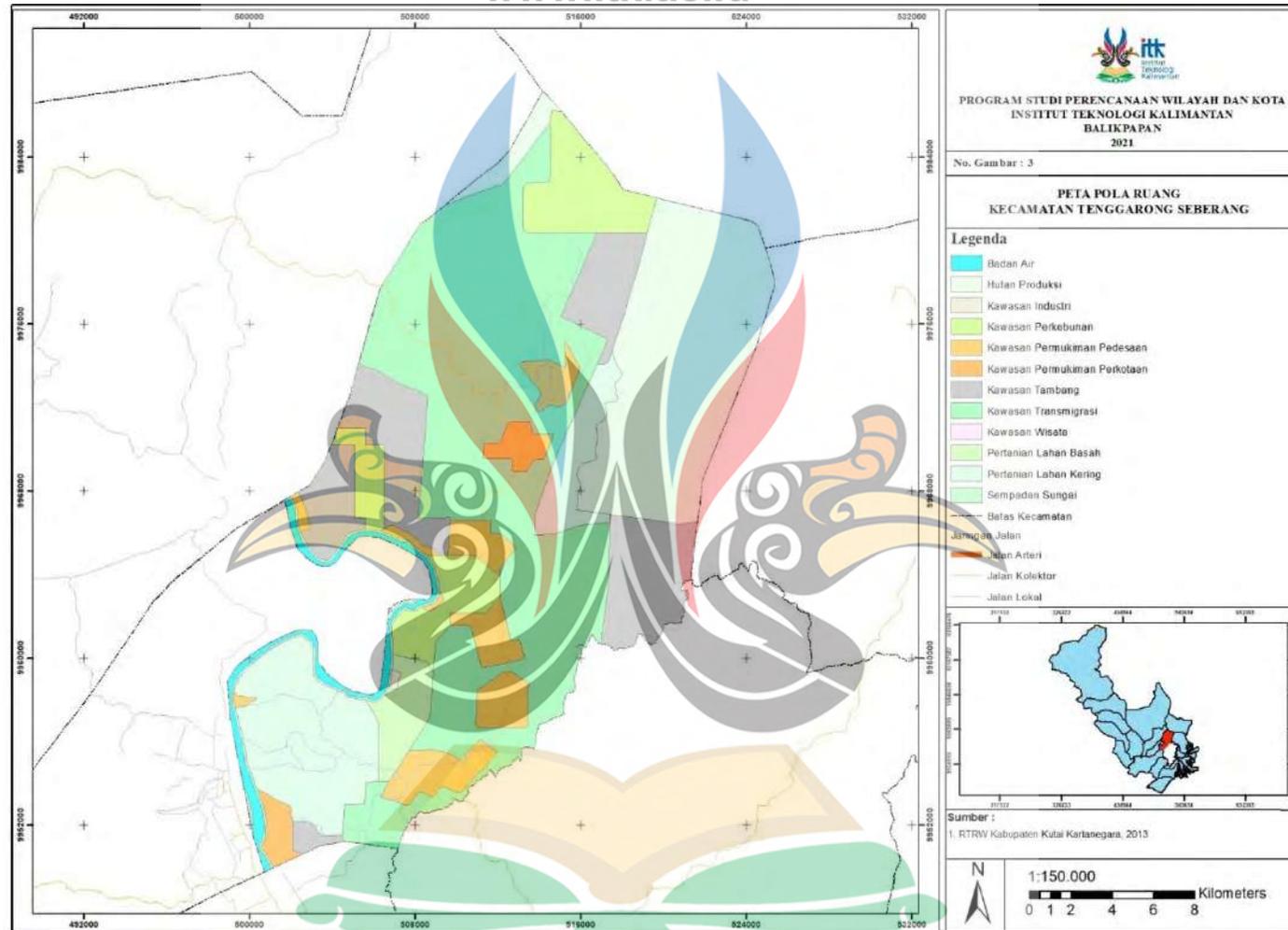


www.itk.ac.id



Gambar 4. 1 Peta Adminsitrasi Kecamatan Tenggarong Seberang

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara



Gambar 4. 2 **Peta Pola Ruang Kecamatan Tenggarong Seberang**

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

4.1.2 Kawasan Pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang

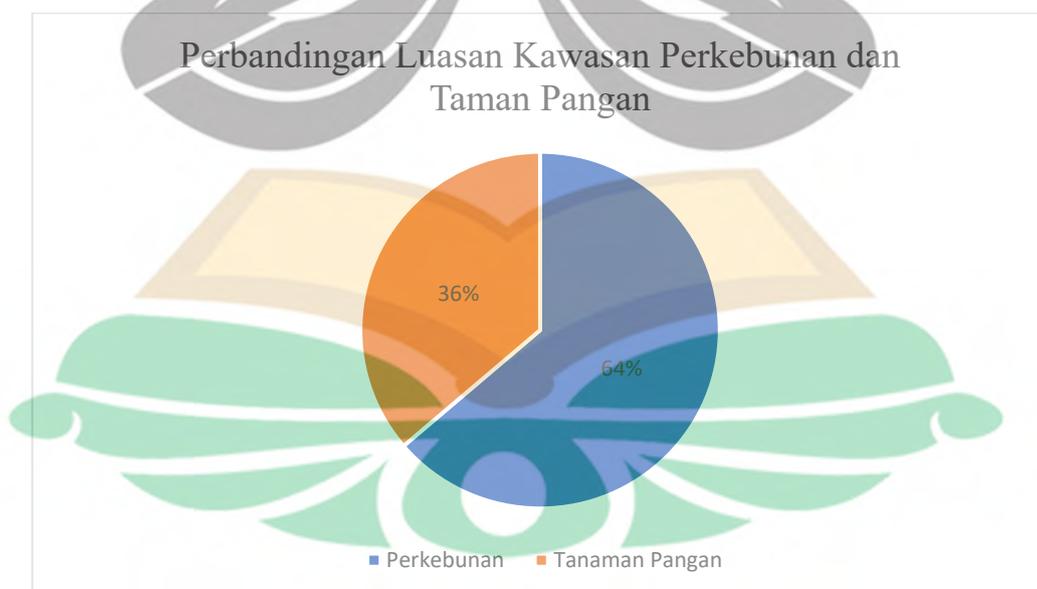
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033, sebagian kawasan Kecamatan Tenggarong Seberang ditetapkan dan direncanakan sebagai kawasan potensial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Zona pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Samboja direncanakan sebesar 1.823,64 Ha. Kawasan pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang sendiri terdiri atas kawasan pertanian dan kawasan perkebunan. Luasan masing-masing sub zona tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Luasan Kawasan Pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang

No.	Kawasan Pertanian	Luasan (Ha)
1.	Perkebunan	1.162,38
2.	Tanaman Pangan	661,26
	Total	1.823,64

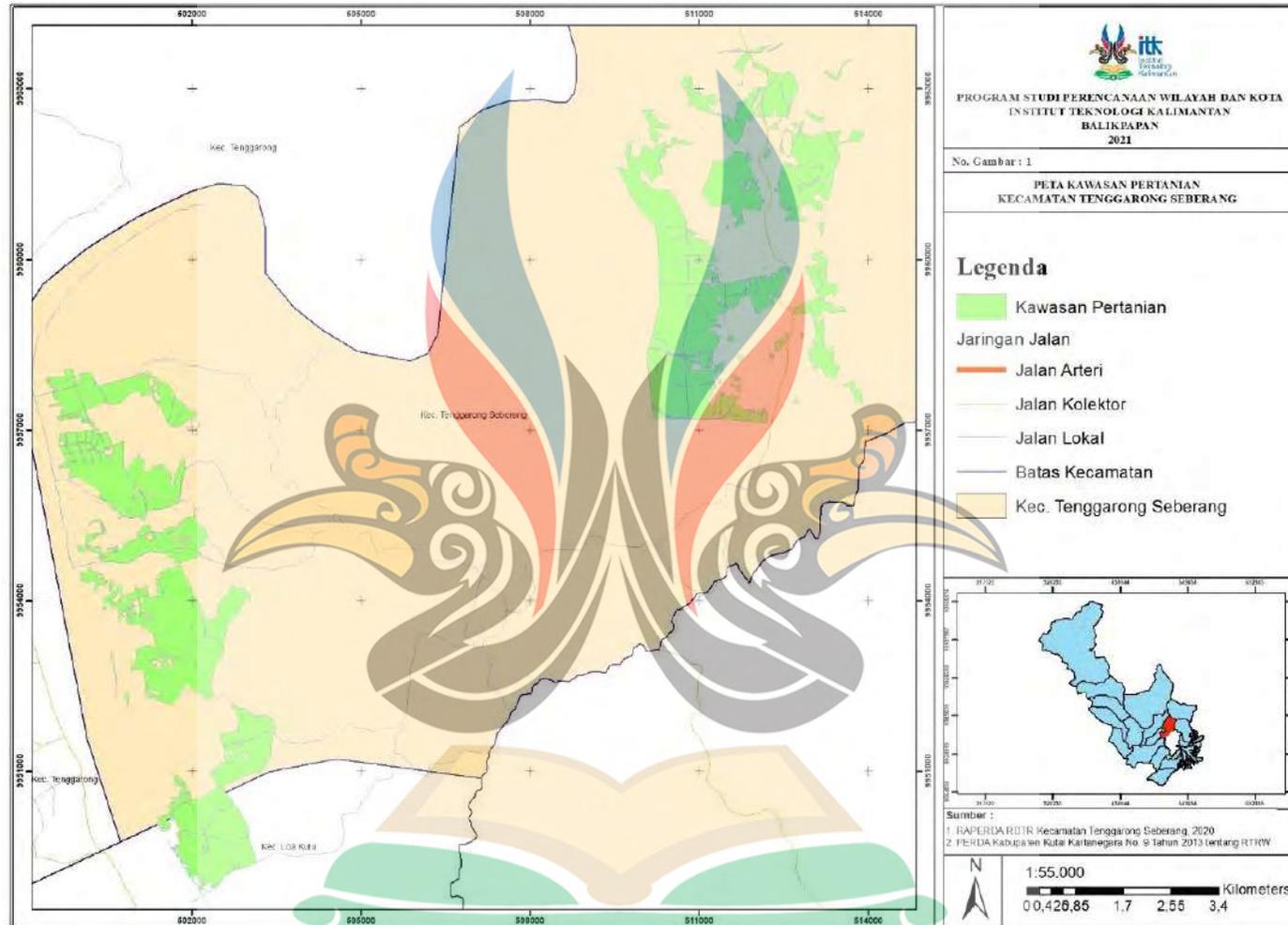
*)RAPERDA RDTR Kecamatan Tenggarong Seberang, 2020

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa luasan kawasan perkebunan memiliki luasan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan luasan kawasan tanaman pangan. Perbandingan antara luasan perkebunan dan tanaman pangan dapat dilihat pada gambar 4.3 dan peta kawasan pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat pada gambar 4.4.



Gambar 4. 3 Perbandingan Luasan Kawasan Perkebunan dan Taman Pangan

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2021



Gambar 4. 4 Peta Kawasan Pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang

Sumber : RAPERDA RDTR Kecamatan Tenggarong Seberang, 2020 dan PERDA Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW

4.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2000 hingga Tahun 2020 per 2 Tahun

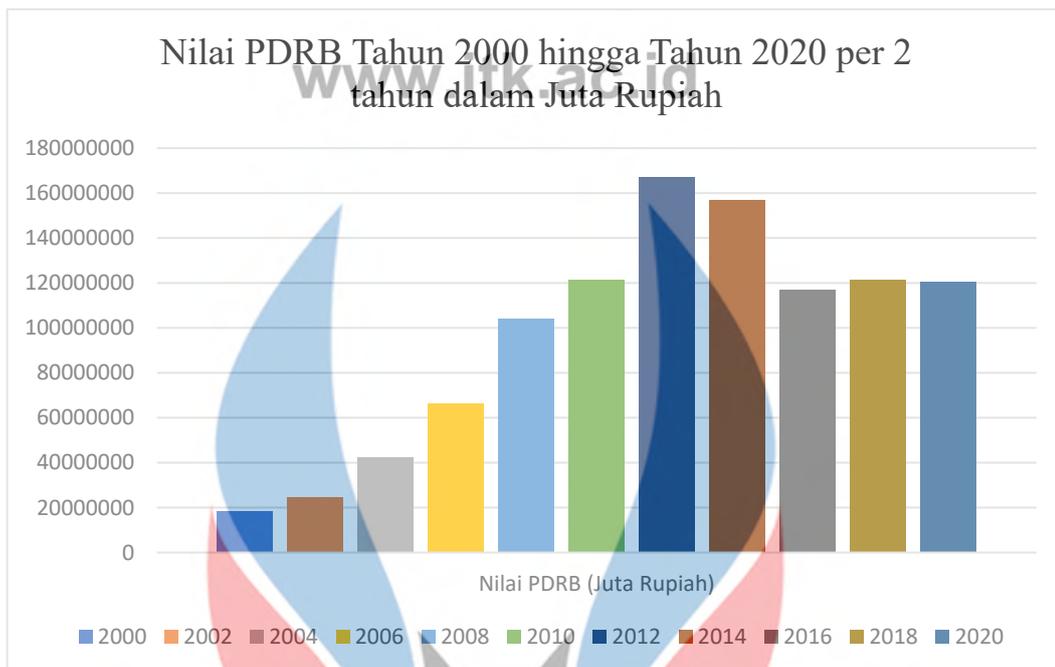
Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan nilai keseluruhan dari barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Perubahan terhadap nilai PDRB merupakan bentuk dari perubahan struktur ekonomi (Moningka, *et al*, 2019). Perubahan tersebut tentunya terus terjadi dari tahun ke tahun. Pada Kabupaten Kutai Kartanegara, perubahan nilai PDRB tahun 2000 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4. 3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2000 hingga Tahun 2020 per 2 Tahun

No.	Tahun	Nilai PDRB (Juta Rupiah)	Presentase Perubahan PDRB (%)
1.	2000	23 404 509	-
2.	2002	26 837 949	14,67
3.	2004	42 409 271	58,02
4.	2006	66.363.636,72	56,48
5.	2008	103.959.393,46	56,65
6.	2010	100.465.049,92	3,36
7.	2012	167.314.214,02	66,54
8.	2014	156.723.063,82	6,33
9.	2016	127.869.342,84	18,41
10.	2018	161.920.385,78	26,63
11.	2020	149.057.816,45	7,94

*)Badan Pusat Statistik Nasional dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara setiap lima tahun memiliki kondisi yang kurang stabil, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010 ke tahun 2012. Sedangkan penurunan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2014 ke tahun 2016. Perubahan nilai PDRB Tahun 2000 hingga tahun 2020 setiap 2 tahunnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut



Gambar 4. 5 Nilai PDRB Tahun 2000 hingga Tahun 2020 per 2 Tahun dalam Juta Rupiah

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

4.1.4 Jumlah Penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2000 hingga Tahun 2020 per 2 Tahun

Perubahan jumlah penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara, jumlah penduduk di Kecamatan Tenggarong Seberang pada tahun 2000 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan mencapai lebih dari 25 ribu jiwa. Sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang menurun sebanyak 274 jiwa. Jumlah penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang pada tahun 2000, 2005, 2010, dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2000 hingga Tahun 2020 per 2 Tahun

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentase Perubahan Jumlah Penduduk (%)
1.	2000	40.050	-
2.	2002	44.381	10,81
3.	2004	48.754	9.85
4.	2006	49.393	1,31
5.	2008	52.583	6.46

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Presentase Perubahan Jumlah Penduduk (%)
6.	2010	61.441	16,85
7.	2012	65.014	5,81
8.	2014	69.447	6,82
9.	2016	73.372	5,65
10.	2018	77.155	5,56
11.	2020	67.877	12,3

*)Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari tahun 2000 hingga tahun 2020, Kecamatan Tenggarong Seberang telah mengalami peningkatan penduduk sebanyak 26.212 atau lebih dari 50% jumlah penduduk pada tahun 2000. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut tentunya meningkatkan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal serta sarana dan prasarana permukiman lainnya. Perubahan jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada visualisasi diagram sebagai berikut



Gambar 4. 6 Perubahan Jumlah Penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2000 hingga Tahun 2020 per 2 Tahun

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara

4.1.5 Jumlah Industri pada Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2000 hingga Tahun 2020 per 2 Tahun

Jumlah industri dapat didefinisikan sebagai jumlah pertumbuhan unit industri (Mokoagow, 2016). Jumlah industri tersebut diketahui berdasarkan jumlah industri

yang tercatat dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang pada penelitian ini merupakan jumlah industri pada Kecamatan Tenggarong Seberang yang tercatat dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah industri di Kecamatan Tenggarong Seberang pada tahun 2000, 2005, 2010, 2015 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4. 5 Jumlah Industri Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2000 hingga Tahun 2020 per 2 Tahun

No.	Tahun	Jumlah Industri (unit)	Presentase Perubahan Jumlah Industri (%)
1.	2000	0	-
2.	2002	0	0
3.	2004	0	0
4.	2006	1	0
5.	2008	2	100
6.	2010	3	50
7.	2012	4	33,33
8.	2014	5	25
7.	2016	5	0
8.	2018	5	0
5.	2020	5	0

*)Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa jumlah industri besar di Kecamatan Tenggarong terjadi peningkatan dari tahun 2006 hingga tahun 2014. Sedangkan dari tahun 2014 hingga tahun 2020 tidak terjadi penambahan jumlah industri besar di Kecamatan Tenggarong Seberang. Industri besar di Kecamatan Tenggarong Seberang sendiri terdiri dari industri kapal dan perahu serta industri plastik.

4.1.6 Nilai Produktivitas Pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang

Produktivitas menurut Purnasari *et al* (2018), dapat diartikan sebagai perbandingan antara keseluruhan sumberdaya yang dimanfaatkan dengan hasil yang dicapai. Produktivitas pertanian pada umumnya di simbolkan dalam satuan kuintal/Ha. Nilai produktivitas pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4. 6 Produktivitas Pertanian pada Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2000 hingga Tahun 2020 per 2 Tahun

No.	Tahun	Produktivitas (ku/Ha)	Presentase Perubahan Produktivitas (%)
1.	2000	46,56	-
2.	2002	46,41	0,32
3.	2004	47,82	3,04
4.	2006	56,10	17,31
5.	2008	50,73	9,57
6.	2010	28,94	42,95
7.	2012	51,38	77,54
8.	2014	54,47	6,01
9.	2016	57,59	5,73
10	2018	46,96	18,93
11.	2020	48,54	3,36

*)Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2001-2020 dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Tenggarong Seberang

Berdasarkan data produktivitas pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang pada tabel 4.6, dapat diketahui bahwa tingkat produktivitas pertanian per dua tahun cenderung berubah ubah. Kondisi tersebut dapat dilihat pada nilai produktivitas tahun 2008 ke 2010 penurunan terbesar yaitu sebesar 21,79 ku/Ha. Sedangkan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010 ke tahun 2012 yaitu sebesar 22,44 ku/Ha.

4.2 Hasil Analisis

4.2.1 Perubahan Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Tenggarong Seberang

Perubahan fungsi lahan pertanian di Kecamatan Tenggarong Seberang diketahui melalui analisis perubahan tutupan lahan menggunakan analisis Citra Landsat 7 dan Landsat 8 pada Tahun 2000 hingga Tahun 2020 per 2 Tahun dengan bantuan *software Quantum GIS* dan *ArcGIS*. Hasil analisis citra tersebut dapat dilihat pada gambar 4.7.

Berdasarkan hasil analisis citra yang telah dilakukan, diketahui bahwa kawasan pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang mengalami perubahan menjadi kawasan non pertanian yang dilihat setiap 2 tahun, dalam kurun waktu 20 tahun yaitu tahun 2000 hingga tahun 2020. Pada tahun 2010 hingga tahun 2012, terdapat kawasan pertanian menjadi kawasan non pertanian. Sedangkan pada tahun

2012 ke tahun 2014 pada kawasan yang sama, kawasan non pertanian berubah kembali menjadi kawasan pertanian. Hal tersebut dikarenakan pada saat analisis citra, citra menunjukkan kawasan pertanian yang terendam air atau sedang terjadi banjir, sehingga di tahun 2012 terdapat kawasan pertanian yang mengalami banjir dan terdeteksi sebagai kawasan non pertanian.

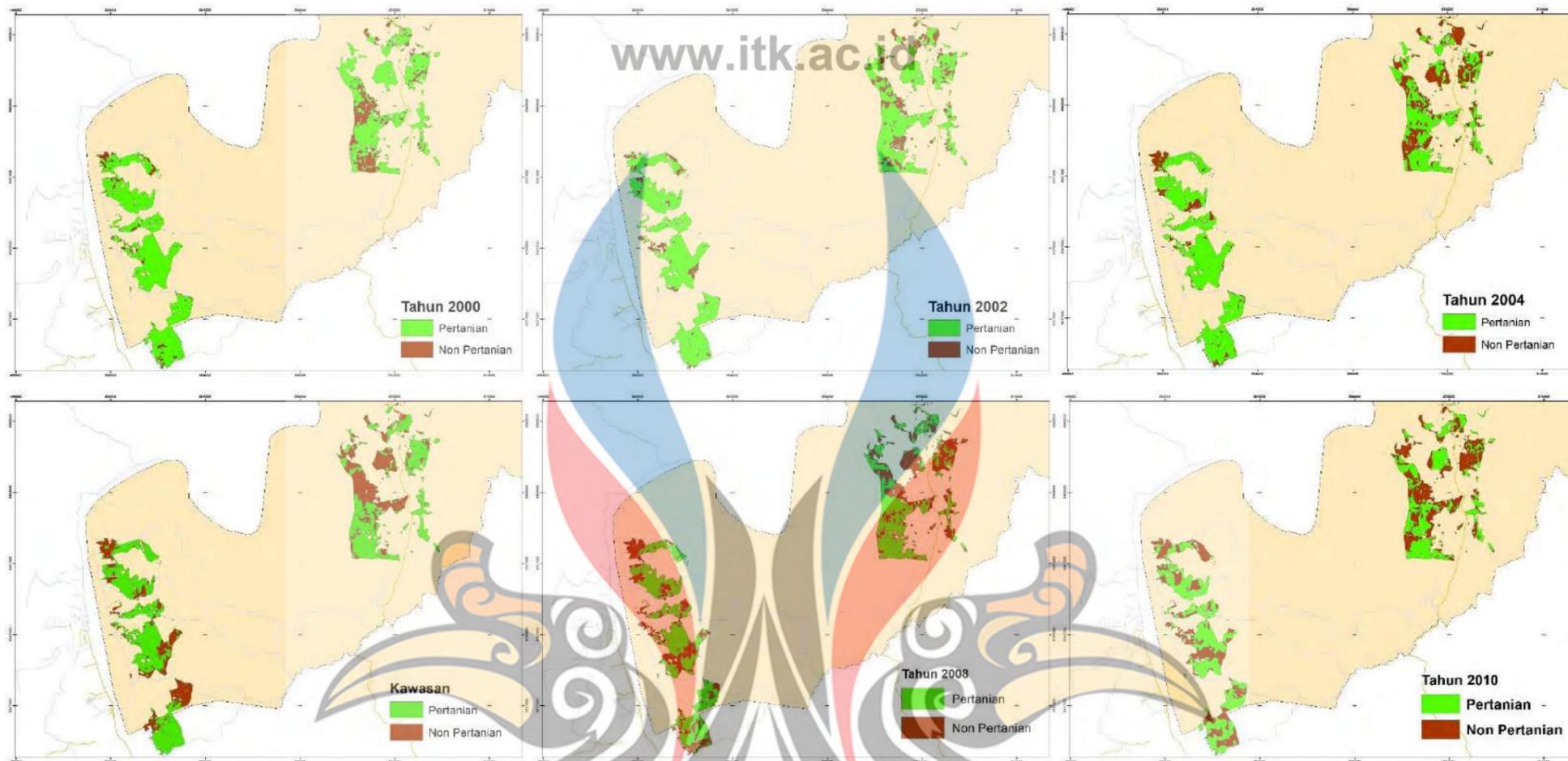
Perubahan luasan kawasan pertanian menjadi kawasan non pertanian pada Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4. 7 Luasan Kawasan Pertanian dan Non Pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2000 hingga Tahun 2020 per 2 Tahun

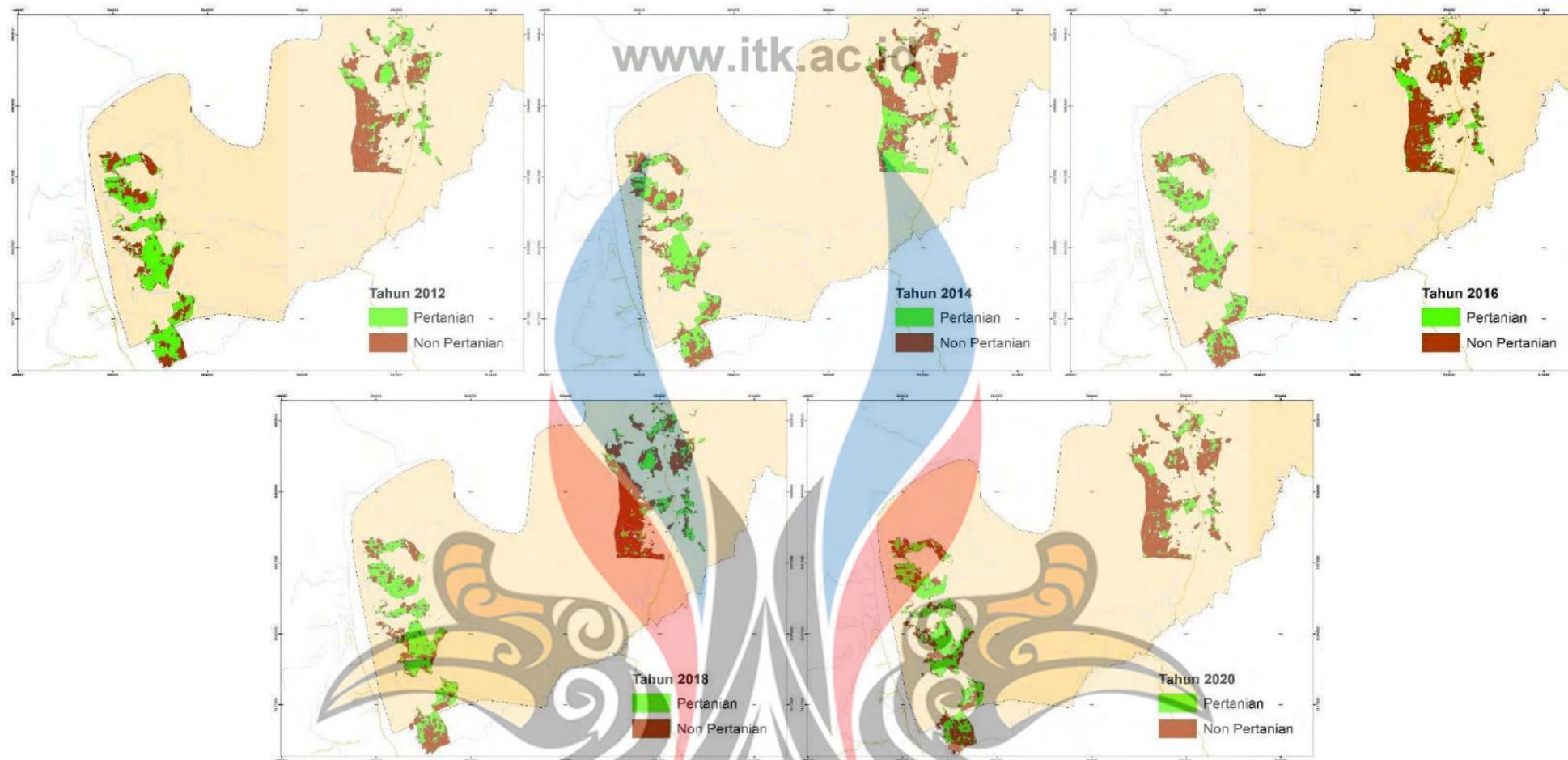
No.	Tahun	Luasan (Ha)		Presentase Perubahan Luas Lahan Pertanian (%)
		Pertanian	Non Pertanian	
1.	2000	1.562,174	262,645	-
2.	2002	1.555,714	269,554	0,41
3.	2004	1.372,745	451,579	11,76
4.	2006	1.221,107	603,596	11,05
5.	2008	1.162,832	658,599	4,77
6.	2010	1.047,276	775,438	9,94
7.	2012	906,299	917,281	13,46
8.	2014	865,434	957,937	5,76
9.	2016	782,216	1039,937	9,61
10.	2018	762,186	1049,110	2,56
11.	2020	755,214	1067,481	0,92

*)Hasil Analisis Penulis, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa terjadi penurunan terhadap kawasan pertanian menjadi kawasan non pertanian dalam kurun waktu 20 tahun, yang dilihat setiap 2 tahun. Penurunan kawasan pertanian terbesar terjadi pada tahun 2010 ke 2012, dimana terjadi penurunan sebesar 140,768 Ha. Sedangkan untuk penurunan luasan kawasan pertanian dari tahun 2000 hingga tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 806,96 Ha



www.itk.ac.id



Gambar 4. 7 Perubahan Fungsi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian Tahun 2000 hingga Tahun 2020 per 2 Tahun

Sumber : Analisis Penulis, 2021



www.itk.ac.id

4.2.2 Faktor Perubahan Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Tenggarong Seberang

Berdasarkan hasil dari analisis perubahan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian, didapatkan luasan kawasan pertanian per 2 tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Hasil tersebut kemudian dianalisis bersama dengan jumlah industri, nilai PRDB dan jumlah penduduk yang telah dirubah menjadi presentase perubahan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Penggunaan nilai presentase perubahan terhadap masing-masing variabel bertujuan untuk menyamakan satuan, sehingga tidak ada ketimpangan antar data.

Penggunaan alat analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dari keempat variabel yaitu perubahan fungsi lahan, jumlah industri, nilai PRDB dan jumlah penduduk. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara keseluruhan memiliki pengaruh pada variabel terikat. Uji F dilakukan dengan cara melihat nilai F yang merupakan nilai F hitung dan nilai Sig. yang menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh pada tabel uji ANOVA. Pada uji F, variabel bebas dapat dikatakan secara bersama sama memiliki pengaruh dengan variabel terikat apabila nilai Sig. memiliki nilai $<0,005$. Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4. 8 ANNOVA
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	149.113	4	37.278	11.167	.010 ^b
	Residual	16.692	5	3.338		
	Total	165.805	9			

a. Dependent Variable: Alih Fungsi (Y)

b. Predictors: (Constant), Penduduk (X4), Produktivitas (X2), PDRB (X3), Industri (X1)

*)Hasil Analisis Penulis, 2021

Berdasarkan tabel ANNOVA pada tabel 4.10, diketahui bahwa nilai Sig. memiliki nilai 0.010 atau lebih dari 0.005. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas yaitu penduduk, produktivitas, PDRB, dan jumlah industri besar tidak memiliki pengaruh secara bersama sama dengan variabel terikat atau perubahan fungsi lahan pertanian.

A. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada di antara angka nol dan angka satu, dimana semakin mendekati angka satu maka variabel bebas dapat memberikan informasi untuk menjelaskan variabel bebas dengan baik. Hasil nilai uji R^2 dapat dilihat pada Adjusted R Square pada tabel Model Summary sebagai berikut

Tabel 4. 9 Model Summary
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.948 ^a	.899	.819	1.82711	2.172

a. Predictors: (Constant), Penduduk (X4), Produktivitas (X2), PDRB (X3), Industri (X1)

b. Dependent Variable: Alih Fungsi (Y)

*)Hasil Analisis, 2021

Pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square berada di angka 0,819. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel penduduk, produktivitas, industri dan PDRB memiliki proporsi pengaruh sebesar 81,9% terhadap perubahan fungsi lahan pertanian di Kecamatan Tenggara Seberang. Sedangkan 18,1% sisanya terdiri dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t berfungsi untuk mengetahui tingkat signifikansi atau sejauh mana variabel independent dapat mempengaruhi variabel dependen secara individu. Pada uji t, variabel bebas dapat dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat apabila nilai t hitung yang disimbolkan dengan Sig. memiliki nilai lebih kecil dari nilai eror yaitu 0,005.

Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4. 10 Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.909	2.150		1.818	.129		
Industri (X1)	.192	.037	1.481	5.122	.004	.241	4.149
Produktivitas (X2)	-.148	.049	-.837	-3.031	.029	.264	3.791
PDRB (X3)	.173	.039	1.008	4.458	.007	.394	2.537
Penduduk (X4)	-.431	.188	-.440	-2.292	.070	.546	1.831

a. Dependent Variable: Alih Fungsi (Y)

*)Hasil Analisis, 2021

Pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa dari keempat variabel bebas yaitu industri (X1), produktivitas (X2), PDRB (X3), dan penduduk (X4), hanya 1 variabel yang memiliki nilai Sig. yang berada dibawah 0,005 yaitu variabel industri. Sehingga, dapat dikatakan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan atau variabel yang berpengaruh terhadap luas alih fungsi lahan pertanian adalah variabel industri yang merupakan perubahan jumlah industri besar.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah perubahan jumlah industri. Sedangkan ketiga variabel lainnya yaitu, perubahan jumlah penduduk, perubahan nilai PDRB dan perubahan produktivitas pertanian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Variabel jumlah industri juga dinilai para stakeholder menjadi variabel paling berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan pertanian, khususnya pada industri pertambangan yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang.

4.2.3 Analisis Jenis Insentif Dan Disinsentif Pengendalian Perubahan Fungsi Lahan Pertanian Di Kecamatan Tenggarong Seberang

Penentuan jenis insentif dan disinsentif pengendalian perubahan fungsi lahan pertanian di Kecamatan Tenggarong Seberang dilakukan menggunakan analisis Delphi. Penggunaan analisis delphi bertujuan untuk mengetahui jenis insentif dan disinsentif apa yang sesuai untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian di Kecamatan Tenggarong Seberang berdasarkan pendapat para stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kawasan pertanian. Jenis insentif dan disinsentif yang digunakan dalam analisis delphi merupakan hasil dari sintesa pustaka. Jenis – jenis tersebut kemudian akan dikonfirmasi melalui wawancara delphi untuk kemudian dilakukan analisis delphi, dimana nantinya akan ditarik kesimpulan terkait jenis insentif dan disinsentif yang sesuai sebagai pengendalian perubahan fungsi lahan pertanian di Kecamatan Tenggarong seberang berdasarkan

keepakatan para stakeholder. Adapun jenis insentif dan disinsentif berdasarkan sintesa pustaka yang dikonfirmasi kepada stakeholder dapat dilihat pada tabel 4.13

Tabel 4. 11 Jenis Insentif dan Disinsentif Hasil Sintesa Pustaka

Ket.	Jenis Insentif dan Disinsentif
Insentif	Pengurangan pajak bumi dan bangunan
	Penyediaan infrastruktur pertanian
	Pengembangan infrastruktur pertanian
	Pembiayaan pembangunan infrastruktur pertanian
	Kemudahan dari peraturan perizinan
Disinsentif	Penambahan pajak bumi dan bangunan
	Peningkatan pajak jual beli lahan
	Pembatasan penyediaan infrastruktur pertanian
	Pengaturan Perizinan
	Pencabutan Insentif

*Hasil Sintesa Pustaka, 2021

A. Wawancara Delphi Tahap I

Pada tahap I analisis Delphi, dilakukan wawancara terkait pendapat para stakeholder mengenai jenis insentif dan disinsentif yang dapat mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian di Kecamatan Tenggarong Seberang, Pada tahapan ini, stakeholder dapat menambahkan jenis insentif dan disinsentif lainnya yang dirasa dapat mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian. Hasil dari wawancara delphi tahap I dapat dilihat pada tabel 4.14.

Berdasarkan hasil analisis Delphi tahap 1, dapat diketahui bahwa tidak semua jenis insentif dan disinsentif mengalami konsensus. Sehingga perlu dilakukan analisis Delphi tahap 2. Adapun uraian mengenai analisis Delphi tahap satu dapat dilihat sebagai berikut

A.1 Jenis Insentif Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Responden yang menyetujui jenis insentif dan disinsentif ini adalah responden 2 dan 3. Responden 2 menyetujui insentif Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk responden 3 menyetujui insentif pengurangan pajak bumi dan bangunan karena dapat mengurangi biaya yang dibutuhkan oleh petani.

Responden yang tidak menyetujui jenis insentif dan disinsentif ini adalah responden 1, 4, dan 5. Responden 1 menyatakan bahwa penerapan pengurangan pajak bumi dan bangunan dinilai kurang efektif apabila

diterapkan di Kecamatan Tenggarong Seberang. Sedangkan untuk responden 4 dan 5 tidak setuju karena pengurangan pajak bumi dan bangunan dapat menurunkan pendapatan daerah. Sehingga dapat diketahui bahwa jenis insentif pengurangan pajak bumi dan bangunan belum mencapai konsensus.

A.2 Jenis Insentif Penyediaan Infrastruktur Pertanian

Semua responden setuju terkait pemberian penyediaan infrastruktur pertanian. Respondern 1, 2, dan 3 berpendapat bahwa pemberian infrastruktur pertanian sendiri sudah diterapkan dan dinilai dapat mempengaruhi pemilik lahan untuk mempertahankan kawasan pertanian miliknya. Sedangkan untuk responden 4 dan 5 berpendapat bahwa adanya penyediaan infrastruktur pertanian dapat meningkatkan perekonomian dari petani. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis insentif penyediaan infrastruktur pertanian telah mencapai konsensus.



Tabel 4. 12 Hasil Wawancara Delphi Tahap I

Keterangan	Jenis Insentif dan Disinsentif	S1	S2	S3	S4	S5
Insentif	Pengurangan pajak bumi dan bangunan	TS	S	S	TS	TS
	Penyediaan infrastruktur pertanian	S	S	S	S	S
	Pengembangan infrastruktur pertanian	S	S	S	S	S
	Pembiayaan pembangunan infrastruktur pertanian	S	S	S	S	S
	Kemudahan dari peraturan perizinan	S	S	S	S	S
Disinsentif	Penambahan pajak bumi dan bangunan	TS	S	TS	TS	TS
	Peningkatan pajak jual beli lahan	S	S	S	S	S
	Pembatasan penyediaan infrastruktur pertanian	S	S	S	TS	TS
	Pengaturan Perizinan	S	S	S	S	S
	Pencabutan Insentif	S	S	S	TS	TS

* Hasil Wawancara, 2021

Keterangan :

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

S1 : BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara

S2 : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

S3 : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara

S4 : Ketua Kelompok Tani

S5 : Pemilik Lahan

A.3 Jenis Insentif Pengembangan Infrastruktur Pertanian

Semua responden setuju terhadap penerapan insentif pengembangan infrastruktur pertanian. Responden 1, 2 dan 3 berpendapat bahwa pemberian insentif pengembangan infrastruktur pertanian dinilai dapat mempengaruhi pemilik lahan untuk mempertahankan lahan pertaniannya. Sedangkan untuk responden 4 dan 5 berpendapat bahwa pemberian insentif pengembangan infrastruktur pertanian dapat meningkatkan semangat para petani untuk menjalankan kegiatan pertaniannya. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa jenis insentif pengembangan infrastruktur pertanian telah mencapai konsensus.

A.4 Jenis Insentif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Semua responden setuju terhadap pengembangan infrastruktur pertanian. Responden 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa pemberian insentif pengembangan infrastruktur pertanian dapat mempengaruhi pemilik lahan untuk mempertahankan lahan pertaniannya. Sedangkan menurut responden 4 dan 5 pemberian insentif berupa pembiayaan pembangunan infrastruktur pertanian sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dari pertanian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis insentif pembiayaan pembangunan infrastruktur pertanian telah mencapai konsensus

A.5 Jenis Insentif Kemudahan dari Peraturan Perizinan

Semua responden menyatakan setuju terhadap insentif kemudahan peraturan perizinan. Responden 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa kemudahan dari peraturan perizinan untuk para petani diperlukan agar para petani lebih mudah dalam mengurus pembuatan sertifikat dan perizinan lainnya. Selain itu, kemudahan dari Peraturan Perizinan untuk para petani juga berfungsi untuk mencegah adanya fungsi lahan lain masuk ke dalam kawasan pertanian. Sedangkan menurut responden 4 dan 5 menyatakan bahwa Kemudahan dari Peraturan Perizinan untuk para petani dapat memudahkan petani dalam pembuatan sertifikat lahan. Sehingga dapat diketahui bahwa jenis insentif kemudahan dari peraturan perizinan telah mencapai konsensus

A.6 Jenis Disinsentif Penambahan Pajak Bumi dan Bangunan

Responden 2 setuju dengan disinsentif penambahan pajak bumi dan bangunan karena sudah sesuai dengan perturan yang berlaku. Sedangkan untuk reponsen 1, 3, 4, dan 5 menyatakan tidak setuju terhadap adanya penambahan pajak bumi dan bangunan. Responden 1 menyatakan bahwa penambahan pajak bumi dan bangunan dinilai tidak terlalu efektif untuk mempengaruhi para petani dalam mempertahankan lahan pertaniannya. Responden 3 menyakatakan bahwa dalam penambahan pajak bumi dan bangunan masih perlu dikaji kembali dan dilakukan koordinasi dengan jenis pajak lainnya. Sedangkan menurut 4 dan 5 berpendapat bahwa pemberian pajak bumi dan bangunan dapat diberikan sesuai standar yang ada karena tidak terlalu berpengaruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis disinsentif peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan belum mencapai konsensus.

A.7 Jenis Disinsentif Peningkatan Pajak Jual Beli

Semua responden setuju terhadap adanya disinsentif peningkatan jual beli. Responden 1, 2, 3, 4, dan 5 menyatakan bahwa peningkatan pajak jual beli dapat mempengaruhi minat dari petani maupun pemilik lahan untuk menjual lahan pertaniannya. Hal tersebut dikarenakan apabila pajak jual beli meningkat dan dibebankan kepada petani selaku penjual lahan maupun pembeli lahan, maka baik pembeli atau penjual lahan akan merasa keberatan untuk melakukan jual beli lahan. Berdasarkan kondisi tersebut dapat diketahui bahwa jenis disinsentif peningkatan jual beli telah mencapai konsensus

A.8 Jenis Disinsentif Pembatasan Penyediaan Infrastruktur Pertanian

Responden 1, 2 dan 3 setuju terhadap adanya pembatasan penyediaan infrastruktur pertanian karena dinilai dapat mempengaruhi pemilik lahan dalam mengalihfungsikan lahannya. Sedangkan menurut pendapat responden 4 dan 5 menyatakan tidak setuju karena pembatasan penyediaan infrastruktur pertanian dapat mengurangi produktivitas pertanian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis disinsentif pembatasan penyediaan infrastruktur pertanian belum mencapai konsensus.

A.9 Jenis Disinsentif Pengaturan Perizinan

Semua responden menyatakan setuju dengan adanya disinsentif pengaturan perizinan. Responden 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa adanya pengaturan perizinan dapat mempengaruhi petani agar tidak mengalih fungsikan lahannya. Responden 3 juga mengatakan bahwa pengaturan perizinan dapat dimaksudkan kepada pembatasan perizinan untuk jenis kegiatan selain pertanian. Sedangkan untuk responden 4 dan 5 menyatakan bahwa pengaturan perizinan dalam hal persulitan pemberian izin untuk kegiatan tertentu dapat mempengaruhi petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa jenis disinsentif pengaturan perizinan telah mencapai konsensus.

A.10 Jenis Disinsentif Pencabutan Insentif

Responden 1, 2, dan 3 menyatakan setuju dengan adanya pemberian jenis disinsentif pencabutan insentif. Responden 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa pencabutan insentif yang diberikan dapat mempengaruhi petani dan pemilik lahan untuk tidak mengalih fungsikan lahanya. Sedangkan untuk responden 4 dan 5 menyatakan tidak setuju. Hal tersebut dikarenakan adanya pencabutan insentis sebagai bentuk disinsentif dapat melemahkan penggerak pertanian maupun petani pemilik lahan yang mempertahankan lahan pertaniannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa jenis disinsentif pencabutan insentif belum mencapai konsensus.

Berdasarkan hasil analisis delphi tahap I yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat 6 jenis insentif dan disinsentif yang telah mencapai konsensus dan 4 jenis insentif dan disinsentif yang belum mencapai konsensus. Jenis insentif dan disinsentif tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 4. 13 Jenis Insentif dan Disinsentif yang Konsensus dan Belum Konsensus

Keterangan	Jenis Insentif dan Disinsentif
Konsensus	Peningkatan pajak jual beli lahan
	Penyediaan infrastruktur pertanian
	Pengembangan infrastruktur pertanian
	Pembiayaan pembangunan infrastruktur pertanian

	Kemudahan dari peraturan perizinan
	Pengaturan Perizinan
	Pengurangan pajak bumi dan bangunan
Belum Konsensus	Penambahan pajak bumi dan bangunan
	Pembatasan penyediaan infrastruktur pertanian
	Pencabutan Insentif

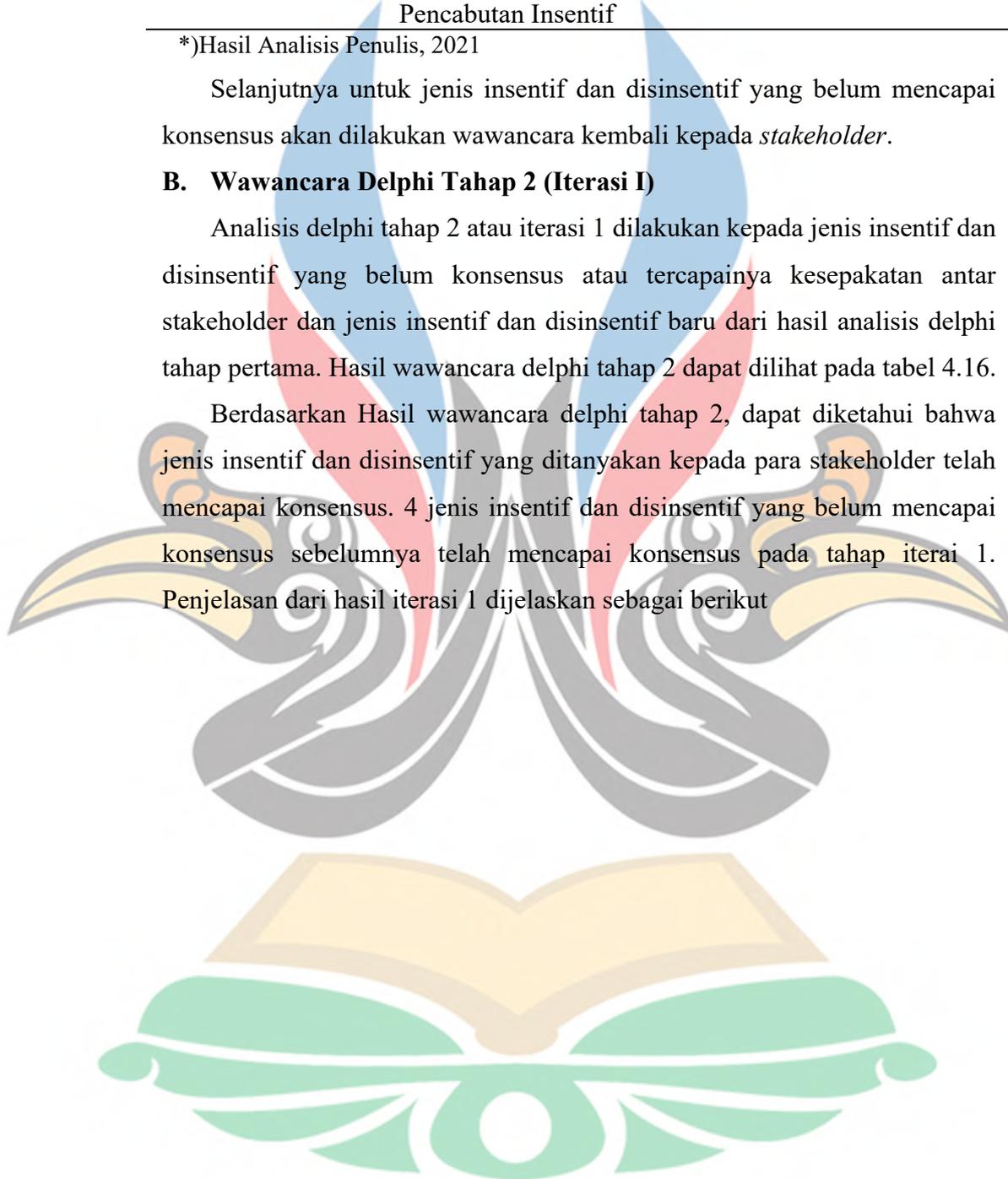
*)Hasil Analisis Penulis, 2021

Selanjutnya untuk jenis insentif dan disinsentif yang belum mencapai konsensus akan dilakukan wawancara kembali kepada *stakeholder*.

B. Wawancara Delphi Tahap 2 (Iterasi I)

Analisis delphi tahap 2 atau iterasi 1 dilakukan kepada jenis insentif dan disinsentif yang belum konsensus atau tercapainya kesepakatan antar *stakeholder* dan jenis insentif dan disinsentif baru dari hasil analisis delphi tahap pertama. Hasil wawancara delphi tahap 2 dapat dilihat pada tabel 4.16.

Berdasarkan Hasil wawancara delphi tahap 2, dapat diketahui bahwa jenis insentif dan disinsentif yang ditanyakan kepada para *stakeholder* telah mencapai konsensus. 4 jenis insentif dan disinsentif yang belum mencapai konsensus sebelumnya telah mencapai konsensus pada tahap iterasi 1. Penjelasan dari hasil iterasi 1 dijelaskan sebagai berikut



Tabel 4. 14 Hasil Wawancara Delphi Tahap I

Keterangan	Jenis Insentif dan Disinsentif	S1	S2	S3	S4	S5
Insentif	Pengurangan pajak bumi dan bangunan	S	S	S	S	S
Disinsentif	Penambahan pajak bumi dan bangunan	S	S	S	S	S
	Pembatasan penyediaan infrastruktur pertanian	S	S	S	S	S
	Pencabutan Insentif	S	S	S	S	S

* Hasil Wawancara, 2021

Keterangan :

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

S1 : BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara

S2 : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

S3 : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara

S4 : Ketua Kelompok Tani

S5 : Pemilik Lahan



B.1 Jenis Insentif Pengurangan Pajak Bumi Bangunan

Semua responden menyatakan setuju bahwa jenis insentif pengurangan pajak bumi bangunan dapat mempengaruhi perubahan fungsi lahan pertanian. Beberapa responden berubah pikiran dan mengatakan alasan pengurangan pajak bumi bangunan dapat saja berpengaruh terhadap perubahan alih fungsi lahan pertanian. Berdasarkan hasil wawancara, responden 1 menyatakan :

“Sebenarnya Pajak Bumi Bangunan ini bisa saja berpengaruh mbak, tapi harus dilaksanakan secara efektif. Karena kalau di Tenggara Seberang sendiri setau saya di beberapa tempat malah ga ditarik sama sekali, walaupun harus bayar juga ga terlalu mahal. Tapi kalo berbicara petani, bisa saja walau pengurangan PBB nya sedikit bisa menaikkan penghasilan mereka”

Kemudian responden 4 menyatakan :

“Setelah saya pikir-pikir lagi, saya setuju mbak kalau PBB itu bisa berpengaruh. Pengaruhnya karena bisa meningkatkan penghasilan petani, karena penghasilan petani itu kecil mbak, sedangkan biaya produksinya terus meningkat. Jadi kalau PBB dikurangi bisa menurunkan biaya produksi walau ga banyak.”

Sedangkan responden 5 menyatakan hal sebagai berikut

“Bisa jadi berpengaruh mbak, karena kalo petani yang lahannya hektaran kan pasti pajaknya lumayan banyak tuh, belum lagi produksi lain lainnya. Harus ada sih mbak yang kaya gitu gitu supaya temen temen petani juga jadi lebih semangat karena biaya produksinya bisa turun.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, diketahui bahwa seluruh responden menyatakan setuju terhadap pengurangan PBB, sehingga jenis insentif pengurangan pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan konsensus. Hal tersebut dikarenakan, walaupun tidak terlalu besar namun PBB dapat meningkatkan biaya produksi, yang apabila dilakukan pengurangan dapat meringankan beban petani.

B.2 Disinsentif Penambahan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil iterasi 1, diketahui bahwa seluruh responden setuju terhadap penambahan pajak bumi dan bangunan. Terdapat beberapa responden yang merubah pendapatnya menjadi setuju terhadap perubahan fungsi lahan pertanian. Responden 1 menyakatakab bahwa :

“Seperti yang saya bilang tadi mbak, sedikit sedikit pasti akan berpengaruh kalau diterapkan secara efektif. Kalau petani yang mau merubahn fungsinya dan dikenakan pajak tinggi pasti mikir mikir mau merubah fungsinya itu”

Kemudian responden 2 menyatakan bahwa :

“Kalau dari segi pajaknya sudah dikaji lagi mungkin bisa berpengaruh si mbak. Karena ya kalau pajaknya makin tinggi petaninya sendiri mikir kedepannya gimana, misalnya dijadikan rumah. Kalau dijadikan rumah pasti pajaknya beda lagi ditambah dinaikkan lagi, penghasilan petaninya juga berkurang karena lahan produktivnya sudah berubah”

Sedangkan responden 4 :

“Bisa juga mbak, kalau buat pajak nya dinaikkan jadinya pasti petani juga mikir mikir buat bangun rumah atau dijual karena jadi beban juga mbak”

Responden 5 menyatakan :

“Iya mbak, kalo dipikir pikir memang harus dinaikkan pajaknya buat yang mau merubah, soalnya ya mbak disini udah dikelilingin tambang, kalo ga dicegah dampaknya bisa ke petani yang lain”

Berasarkan kelima kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh responden setuju dengan adanya peningkatan pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pajak bumi dan bangunan dapat berpengaruh kepada pendapat petani, walaupun tidak banyak. Responden 1 juga menegaskan bahwa jenis disinsentif ini akan berpengaruh dengan efektif apabila penerapannya sudah maksimal. Sehingga jenis disinsentif peningkatan pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan konsensus.

B.3 Jenis Disinsentif Pembatasan Infrastruktur Pertanian

Berdasarkan hasil iterasi 1 dapat diketahui bahwa semua responden menyetujui jenis insentif dan disinsentif pembatasan infrastruktur pertanian. Responden 4 dan responden 5 merubah pendapatnya dari yang awalnya tidak setuju menjadi setuju. Responden 4 menyatakan bahwa :

“Saya setuju sih mbak, soalnya kan tujuannya memang supaya tidak ada yang berubah dari petani ke yang lain atau malah sampai jual lahannya, soalnya pasti nanti berdampak juga ke petani lain”

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan responden 4 setuju dikarenakan adanya pembatasan infrastruktur pertanian bertujuan untuk merubah niatan petani yang ingin mengalih fungsikan lahannya karena dapat berdampak ke petani lainnya. Sedangkan responden 5 menyatakan bahwa :

“Bisa mbak, infrastruktur buat mereka dibatasin aja, supaya mereka kapok dan gamau jual jual lahan lagi, karena ya.. disini sudah banyak mbak yang jual lahan ke tambang”.

Responden 5 menyatakan bahwa adanya pembatasan infrastruktur pertanian bertujuan untuk memberikan efek jera kepada petani yang mengalih fungsikan lahannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis disinsentif untuk pembatasan infrastruktur pertanian telah mencapai konsensus

B.4 Jenis Disinsentif Pencabutan Insentif

Berdasarkan hasil iterasi 1, seluruh responden menyatakan setuju terhadap jenis disinsentif pencabutan insentif. Beberapa responden yang merubah pendapat nya adalah responden 4 dan responden 5. Responden 4 menyatakah bahwa :

“Pencabutan insentif ini kaya bantuan yang dikasih gitu dicabut ya mbak buat yang udah gamau bertani atau milih ngejual lahannya gitu ya? Kalau gitu saya setuju mbak, supaya petani disini tetap bertani aja, karena kalau di sekitar kita sudah berubah pasti ada dampak ke kita”

Sedangkan responden 5 menyatakan bahwa :

“Bantuan yang dicabut cuma buat yang rubah alih fungsinya kan ya mbak? Kalo gitu saya setuju banget mbak, biar orang orang itu bener

bener hilang niatan buat ngejual, apalagi kaya ke daerah tambang gitu mbak” www.itk.ac.id

Menurut responden 4 dan 5 merubah menjadi setuju terhadap pencabutan insentif. Hal tersebut dikarenakan agar para petani dapat menghilangkan niatnya untuk menjual lahan pertaniannya. Dikarenakan semua responden menyatakan setuju terhadap pencabutan insentif maka dapat dikatakan bahwa jenis disinsentif pencabutan insentif telah konsensus.

C. Kesimpulan Analisis Delphi

Berdasarkan hasil analisis delphi yang dilakukan setelah tahap iterasi, didapatkan jenis insentif dan disinsentif yang telah disepakati oleh seluruh responden. Adapun jenis insentif dan disinsentif tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 4. 15 Hasil Analisis Delphi Jenis Insentif dan Disinsentif Kawasan Pertanian di Kecamatan Tenggarong Seberang

Keterangan	Jenis Insentif dan Disinsentif
Insentif	Pengurangan pajak bumi dan bangunan
	Penyediaan infrastruktur pertanian
	Pengembangan infrastruktur pertanian
	Pembiayaan pembangunan infrastruktur pertanian
	Kemudahan dari peraturan perizinan
Disinsentif	Penambahan pajak bumi dan bangunan
	Peningkatan pajak jual beli lahan
	Pembatasan penyediaan infrastruktur pertanian
	Pengaturan Perizinan
	Pencabutan Insentif

*)Hasil Analisis Penulis, 2021

Berdasarkan tabel 4,17 dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil analisis delphi jenis insentif dan disinsentif Kawasan Pertanian di Kecamatan Tenggarong Seberang terdapat 5 jenis insentif dan 5 jenis insentif yang di telah di sepakati oleh para stakeholder. Penjelasan terkait jenis insentif dan disinsentif tersebut dijelaskan sebagai berikut

A. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Pengurangan pajak bumi dan bangunan dinilai dapat mempengaruhi perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Hal tersebut dikarenakan adanya pajak bumi dan bangunan dapat mengurangi beban para petani. Kemudian untuk pajak bumi dan bangunan apabila benar diterapkan diperlukan penegakan

peraturan oleh pemerintah agar insentif ini dapat berlaku dengan efektif untuk mencegah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

B. Penyediaan Infrastruktur Pertanian

Penyediaan infrastruktur dinilai dapat mempengaruhi perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Hal tersebut dikarenakan penyediaan infrastruktur khususnya jalan usaha tani, irigasi teknis serta alat panen dibutuhkan oleh petani. Apabila infrastruktur tersebut tersedia, maka petani akan berpikir kembali untuk menjual lahan pertaniannya karena adanya infrastruktur pertanian juga dapat meningkatkan nilai produktivitas pertanian dan meningkatkan perekonomian masyarakat secara tidak langsung.

C. Pengembangan Infrastruktur Pertanian

Pengembangan infrastruktur dinilai dapat mempengaruhi perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Hal tersebut dikarenakan pengembangan infrastruktur pertanian yang sudah ada khususnya jalan usaha tani, irigasi teknis serta alat panen dibutuhkan oleh petani. Apabila infrastruktur tersebut terus dikembangkan hingga tingkat maksimal, maka petani akan berpikir kembali untuk menjual lahan pertaniannya. Selain itu, pengembangan infrastruktur pertanian juga dapat membantu peningkatan produktivitas dan meningkatkan perekonomian petani secara tidak langsung.

D. Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dinilai dapat mempengaruhi perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan pembangunan infrastruktur pertanian dapat meringankan beban para petani dalam penyediaan infrastruktur pertanian atau berpengaruh terhadap perekonomian petani. Pada saat ini, pembiayaan pembangunan infrastruktur pertanian sudah dilakukan, namun masih sangat terbatas dan belum merata.

E. Kemudahan dari perizinan

Kemudahan dari perizinan dinilai dapat mempengaruhi perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Kemudahan dari perizinan dimaksudkan untuk mempermudah para petani pemilik lahan baik dari segi waktu, biaya maupun persyaratan administrasi dalam pengurusan perizinan seperti sertifikat tanah. Sehingga, adanya kemudahan perizinan apabila dilakukan secara efektif dapat

merubah pola pikir dari petani untuk tidak merubah fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lahan lainnya. www.itk.ac.id

F. Penambahan Pajak Bumi dan Bangunan

Penambahan pajak bumi dan bangunan dinilai dapat menjadi disinsentif yang mempengaruhi perubahan fungsi lahan pertanian. Pembebanan pajak bumi dan bangunan yang tinggi pada pemilik lahan yang ingin mengalih fungsikan lahannya dapat mempengaruhi petani untuk tidak mengalih fungsikan lahannya dikarenakan kegiatan pertanian menjadi mata pencaharian utama mayoritas petani. Sehingga apabila pemilik lahan ingin mengalih fungsikan sebagian lahannya, maka dapat berdampak kepada pajak bumi dan bangunan di lokasi lain dengan pemilik yang sama. Penerapan pajak bumi dan bangunan harus lah dilakukan secara efektif untuk dapat mencegah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

G. Peningkatan Pajak Jual Beli Lahan

Peningkatan pajak jual beli lahan dinilai dapat mempengaruhi perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Pembebanan pajak jual beli yang tinggi dan di bebankan kepada pemilik lahan akan membuat petani kembali berfikir untuk mengalih fungsikan lahannya. Sehingga, dari adanya jenis disinsentif ini dapat mencegah perubahan kawasan pertanian menjadi non pertanian. Agar jenis insentif ini dapat menimbulkan dampak yang maksimal, maka dibutuhkan ketegasan pemerintah dalam menerapkannya.

H. Pembatasan Penyediaan Infrastruktur Pertanian

Pembatasan penyediaan infrastruktur pertanian dinilai berpenaruh terhadap perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Mayoritas pemilik lahan bermata pencaharian petani yang membutuhkan infrastruktur pertanian. Apabila pemilik lahan mengalih fungsikan lahannya, maka akan dikenakan disinsentif terbatasnya penyediaan infrastruktur yang nantinya hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan kegiatan pertanian pemilik lahan. Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan penyediaan infrastruktur pertanian dapat berdampak kepada produktivitas pertanian serta pendapatan dari petani.

I. Pengaturan Perizinan

Pengaturan perizinan dinilai dapat berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Pengaturan perizinan sendiri dilakukan

dengan mempersulit proses baik dari segi biaya, waktu dan administrasi dalam kegiatan jual beli maupun perizinan selain pertanian. Hal tersebut dimaksudkan agar para petani mengurungkan niatnya untuk melakukan alih fungsi lahan dikarenakan sulitnya proses dalam mengurus izin non pertanian dalam kawasan pertanian.

J. Pencabutan Insentif

Pencabutan insentif dinilai dapat berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan pertanian. Pencabutan insentif sendiri dilakukan dengan mencabut semua bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada pemilik lahan. Adanya jenis disinsentif dengan bentuk pencabutan insentif berfungsi untuk memberikan kesan dirugikan setelah melakukan alih fungsi lahan yang diharapkan dapat mencegah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian,

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan diketahui bahwa terdapat 10 jenis insentif dan disinsentif yang dinilai dapat mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dengan faktor utama yaitu penambahan jumlah industri besar. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan pada masing-masing jenis insentif dan disinsentif, jenis insentif dan disinsentif tersebut dinilai dapat menjawab permasalahan alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Tenggarong Seberang. 10 jenis insentif dan disinsentif tersebut telah disetujui oleh kelima stakeholder yang terkait di dalam penelitian ini.

4.3 Temuan Penelitian

Pada penelitian insentif dan disinsentif Kawasan Pertanian Kecamatan Tenggarong Seberang, terdapat beberapa jenis insentif dan disinsentif baru yang dikemukakan oleh para stakeholder namun tidak menjadi jenis insentif disinsentif untuk pengendalian perubahan fungsi lahan pertanian di Kecamatan Tenggarong Seberang. Hal tersebut dikarenakan jumlah *stakeholder* yang mengemukakan jenis insentif dan disinsentif tersebut tidak lebih dari setengah dari keseluruhan stakeholder. Jenis insentif dan disinsentif baru yang dikemukakan oleh stakeholder yaitu jaminan harga pasar serta penyuluhan pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan penjelasan sebagai berikut

A. Jaminan Harga Pasar

Pemberian jaminan harga pasar dikemukakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara serta BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara. Jaminan harga pasar yang dimaksud adalah pemerintah menjamin harga jual hasil produksi pertanian petani di pasaran. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kerugian para petani saat masa panen raya, dikarenakan saat hasil produksi meningkat maka harga barang akan cenderung menurun dan petani merugi. Apabila terdapat jaminan harga hasil produksi di pasaran, maka petani tidak perlu khawatir terhadap kerugian saat masa panen raya. Sehingga petani akan terus melakukan kegiatan pertanian dan tidak berfikir untuk mengalih fungsikan lahannya.

B. Penyuluhan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman

Penyuluhan pengendalian hama dan penyakit tanaman dikemukakan oleh pemilik lahan dan ketua kelompok tani. Penyuluhan mengenai pengendalian hama dan penyakit tanaman dirasa dibutuhkan oleh para petani karena hama dan penyakit tanaman menjadi salah satu masalah utama dalam kegiatan pertanian. Petani sering kali mengalami kerugian dan gagal panen akibat serangan hama dan penyakit tanaman. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan pengetahuan petani yang terbatas terhadap pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman.